

Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat, Sistem Keuangan Desa dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Luwu Timur

Sulaiman Ahmad^{*1}, Sapar²

^{1,2}Program Studi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Palopo, Indonesia
Email: 1atsulrasyid@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat (X1), kompetensi aparat (X2), sistem keuangan desa (X3) dan pengawasan (X4) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y). Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menyebarkan angket kepada aparat desa dari 124 desa di Kabupaten Luwu Timur. Hasil distribusi angket tersebut total 95 desa dilakukan pengukuran menggunakan skala likert dan pengujian penelitian dengan *Structural Equation Modeling (SEM)* menggunakan aplikasi Smart-PLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesa pertama menyatakan nilai $t_{Hitung} 1.269 < t_{Tabel} 1.986$ dengan $P_{Value} 0,205 > 0,05$ artinya Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Hipotesa kedua nilai $t_{Hitung} 2,314 > t_{Tabel} 1.986$ dengan $P_{Value} 0,021 < 0,05$ artinya Kompetensi Aparat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Hipotesa ketiga nilai $t_{Hitung} 0,190 < t_{Tabel} 1.986$ dengan $P_{Value} 0,849 > 0,05$ artinya Siskudes berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Hipotesa keempat nilai $t_{Hitung} 3,203 > t_{Tabel} 1,972$ dengan $P_{Value} 0,001 < 0,05$ artinya Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Sehingga disarankan agar pemerintah desa memaksimalkan Partisipasi Masyarakat dan pemanfaatan Siskeudes serta mempertahankan Kompetensi Aparat dan Pengawasan agar Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Luwu Timur semakin baik.

Kata kunci: akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kompetensi aparat, partisipasi masyarakat, pengawasan

Judul Bahasa The Effect of Community Participation, Apparatus Competence, Village Financial System and Supervision on Village Financial Management Accountability in East Luwu Regency

Abstract

This study aims to analyze the effect of community participation (X1), apparatus competence (X2), village financial system (X3) and supervision (X4) on village financial management accountability (Y). The method used is a quantitative method by distributing questionnaires to village officials from 124 villages in East Luwu Regency. The results of the distribution of the questionnaire a total of 95 villages were measured using a Likert scale and research testing with Structural Equation Modeling (SEM) using the Smart-PLS application. The results of this study indicate that the first hypothesis states that the t_{Count} value is $1,269 < t_{Table} 1,986$ with a P_{Value} of $0.205 > 0.05$, meaning that Community Participation has a positive but not significant effect on Village Financial Management Accountability. The second hypothesis is the value of $t_{Count} 2.314 > t_{Table} 1.986$ with a P_{Value} of $0.021 < 0.05$, meaning that Apparatus Competence has a positive and significant effect on Village Financial Management Accountability. The third hypothesis is the value of $t_{Count} 0.190 < t_{Table} 1.986$ with a P_{Value} of $0.849 > 0.05$, meaning that Siskudes has a positive but not significant effect on Village Financial Management Accountability. The fourth hypothesis is that the value of $t_{Count} 3.203 > t_{Table} 1.972$ with a P_{Value} of $0.001 < 0.05$, meaning that supervision has a positive and significant effect on Village Financial Management Accountability. So it is suggested that the village government maximizes Community Participation and utilization of Siskeudes and maintains Apparatus Competence and Supervision so that Village Financial Management Accountability in East Luwu Regency is getting better.

Keywords: accountability of village financial management, apparatus competence, community participation, supervision

1. PENDAHULUAN

Dengan adanya Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dampak yang cukup besar terhadap desa, dikarenakan desa diberi kewenangan yang lebih luas dalam hal mengelola dirinya sendiri. Kewenangan yang diberikan itu adalah dalam rangka melaksanakan empat poin inti yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk melaksanakan poin inti ini pemerintah pusat maupun daerah mengucurkan dana yang cukup besar pada desa untuk mengurus pemerintahan dan menyelenggarakan pembangunannya. Total senilai Rp68 triliun rupiah dana desa digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada 74.961 Desa seluruh Indonesia pada Tahun 2022.[1] Dengan jumlah dana desa yang cukup besar tersebut tentunya pemerintah desa memiliki tanggungjawab besar pula dalam pengelolaan keuangannya.

Dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. [2] Yang selanjutnya mengamanatkan dalam asas pengelolaan keuangan desa yaitu dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Akuntabilitas merupakan unsur pokok dalam perwujudan pengelolaan keuangan yang baik yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Menurut Pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan kondisi dimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan disampaikan atau disajikan kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang dengan dukungan sistem akuntansi menghasilkan informasi yang akurat, andal, tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan. [3]

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat adalah elemen penting dalam pengelolaan keuangan desa. Melalui partisipasi masyarakat maka akan mendukung tugas pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengatur agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat juga bertujuan untuk mencapai hasil yang tepat sasaran dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. [4]. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Selanjutnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa, maka seorang aparatur desa harus memiliki kemampuan yang cukup untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa. Jika aparatur desa berkompeten dalam mengelola keuangan desa maka hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan desa tersebut. [5]. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Selain itu untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri bersinergi membuat suatu aplikasi yang disebut Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes menjadi *tools* bagi pemerintah desa dalam membuat pelaporan keuangan desa. Dengan pelaporan yang terintegrasi dan terkomputerasi akan meminimalkan tindak penyimpangan sehingga akan semakin akuntabel. [6] Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Siskeudes berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta hasil yang dikehendaki serta mengambil tindakan perbaikan bila diperlukan. Pengawasan yang efektif membantu dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik. Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini terdiri dari tugas-tugas memonitor dan mengevaluasi aktivitas instansi agar target instansi dapat tercapai. [7]. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah terluar dan terjauh yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat 124 Desa dari 11 Kecamatan yang menjadi bagian dari Kabupaten ini. Pengelolaan keuangan di beberapa desa masih belum optimal disebabkan karena kurangnya antusiasme masyarakat dalam urusan pemerintahan didesa. Selain itu pemahaman aparat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan masih sangat rendah dilihat dari penyampaian dan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang tidak sesuai dengan ketentuan. Imbasnya terjadi keterlambatan pencairan keuangan desa sehingga pelaksanaan kegiatan pun terhambat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat (X1), kompetensi aparat (X2), sistem keuangan desa (X3) dan pengawasan (X4) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Isi dari metode penelitian adalah memformulasikan permasalahan yang diteliti dengan lebih rinci (sedapat mungkin ditulis secara matematis) dan menjelaskan metode yang diusulkan. Apabila menggunakan sebuah

2.1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa ditinjau dari ruang lingkup pengelolaannya pada dasarnya hampir sama dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten/kota. Dengan jumlah kapasitas dan kapabilitas aparat desa yang terbatas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa seharusnya dibuat sederhana tanpa mengurangi azas transparansi dan akuntabilitas. [8]

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk bisa memberikan pertanggungjawaban, menyampaikan atau menyajikan laporan, mengungkapkan seluruh aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah. [9]

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan BPD. Masyarakat tidak hanya sekedar memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan akan tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. [6]

Indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Penyampaian atau penyajian laporan keuangan desa kepada *stakeholder*.
2. Pengungkapan seluruh aktivitas dan kegiatan pengelolaan keuangan desa. [9].

2.2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan andil dalam suatu kegiatan, yaitu didahului dengan perencanaan hingga evaluasi. Terkait dengan hal ini, maka partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa bertumpu pada keikutsertaan penduduk secara serta-merta dalam membuat keputusan, merencanakan, mengimplementasikan, hingga mengevaluasi. [11]

Partisipasi masyarakat merupakan pendapat responden atas keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat secara sadar dalam proses pembangunan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Sesuai *agency theory* bahwa masyarakat sebagai *principal* memberikan kepercayaan kepada pemerintah sebagai agen dalam pengelolaan keuangan desa. [12]

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemerintah mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi dengan tujuan pengawasan dan kontrol agar tidak terjadi penyalagunaan wewenang. [13]

Indikator partisipasi masyarakat yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Ikut serta dalam perencanaan
2. Ikut serta dalam pelaksanaan
3. Ikut serta dalam evaluasi [11].

2.3. Kompetensi Aparat

Menurut Hevesi (2005) kompetensi adalah karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), dan keterampilan (*skill*) dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Tingkatan kompetensi bisa dinilai berdasarkan latar belakang pendidikan yang dimiliki, pelatihan, serta ketrampilan yang dimiliki. [15].

Abdussamad (2014) membagi kompetensi SDM dalam dua tingkatan yakni ada yang tampak dan yang tidak tampak, spencer dan spencer mengilustrasikan seperti gunung es di mana ada yang tampak di permukaan, adapula yang tidak terlihat di permukaan. Kompetensi SDM yang tampak di permukaan adalah Pengetahuan (*Knowledge*) dan Keterampilan (*Skill*), kompetensi SDM yang tidak tampak di permukaan adalah Nilai-nilai (*Srole*), konsep diri (*self image*), karakteristik personal (*traits*), dan motif (*motives*). [16].

Komptensi kerja merupakan kemampuan kinerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. [17]

Indikator kompetensi aparat yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Pengetahuan (*Knowledge*)
2. Kemampuan (*Ability*)
3. Keterampilan (*Skill*) [15].

2.4. Sistem Keuangan Desa

Leitch & Davis (1983) merumuskan bahwa penggunaan sistem keuangan dalam sebuah entitas organisasi sangat dibutuhkan karena adanya pengolahan transaksi harian sebagai suatu kebutuhan dalam organisasi dan dapat menyajikan laporan-laporan yang berkualitas kepada pihak yang membutuhkan. [18]

BPKP (2016) menyatakan bahwa Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. [4].

Aplikasi Siskeudes yaitu sebuah alat yang dapat membantu Pemerintah Desa Mengelola Keuangan Desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban melalui sistem komputer untuk menghasilkan kualitas tata kelola keuangan desa yang lebih baik. [19]

Indikator sistem keuangan desa yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Sesuai dengan regulasi.
2. Membantu pengelolaan keuangan desa.
3. Kemudahan dalam penggunaan aplikasi.
4. Didukung dengan petunjuk dan pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.
5. *Built – in* internal control.
6. Kesenambungan maintenance karena merupakan aplikasi resmi pemerintah.
7. Aplikasi dapat diintegrasikan dengan aplikasi terkait pengelolaan keuangan desa lainnya. [4].

2.5. Pengawasan

Permendagri 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan menteri ini diatur mengenai pengawasan oleh APIP, Pengawasan oleh camat, pengawasan oleh Badan Pemusyawaratan Desa, pengawasan oleh masyarakat desa, sistem informasi pengawasan dan pendanaan.

Handayanungrat (1994), Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap rencana (planning) yang telah diputuskan, pemerintah (order), terhadap pelaksanaan pekerjaan (performance), tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya. [21]

Indikator pengawasan yang digunakan oleh peneliti yaitu pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) meliputi:

1. Reviu
2. Monitoring
3. Evaluasi
4. Pemeriksaan
5. Pengawasan lainnya [22].

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pengukuran menggunakan skala likert dan pengujian penelitian dengan *Structural Equation Modeling (SEM)* menggunakan aplikasi Smart-PLS. Populasi dalam penelitian ini adalah unsur Aparat Desa pada 124 Desa di Kabupaten Luwu Timur dengan sampel berjumlah 95 Desa yang diperoleh menggunakan rumus Slovin. Menurut Sugiyono Populasi merupakan kumpulan menyeluruh dari suatu objek yang merupakan perhatian peneliti, dimana objek penelitian tersebut berupa makhluk hidup, benda-benda sistem dan prosedur, fenomena, dan lain-lain. [23] Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode angket dengan cara memberikan sederet pertanyaan untuk dijawab oleh responden.

Uji validitas menggunakan metode koefisien korelasi pearson dengan jumlah (n) = 15 dan R_{tabel} sebesar 0.514. [24] Hasil uji validitas instrumen menunjukkan bahwa 35 butir pernyataan yang disampaikan kepada responden seluruhnya valid. Oleh karena itu, dapat digunakan untuk proses pengambilan data penelitian.

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan atau pernyataan tersebut konsisten atau stabil dari masa kemasa. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara *one shoot* atau pengukuran sekali saja dengan alat bantu SPSS uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.60.

Hasil uji reliabilitas instrumen menunjukkan bahwa 35 butir pernyataan yang disampaikan kepada responden seluruhnya reliabel. Oleh karena itu, seluruh instrumen dapat digunakan untuk proses pengambilan data penelitian.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

1. Analisis Deskriptif

Tabel 1. Sebaran responden berdasarkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Kategori (Skala 1-5)	Frequency	Percent
Rendah (<26)	4	4.2
Sedang (26-30)	5	5.3
Tinggi (>30)	86	90.5
Jumlah	95	100.0
Rata-rata	2.96	

Berdasarkan hasil tabel 1 diatas menunjukkan mayoritas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 90,5 persen, kategori sedang 5,3 persen dan 4,2 persen terkategori rendah. Secara keseluruhan, rata-rata akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah 2,96 pada skala 1 sampai 5. [25].

Tabel 2. Sebaran responden berdasarkan Partisipasi Masyarakat (X1)

Kategori (Skala 1-5)	Frequency	Percent
Rendah (<25)	22	18.3
Sedang (25-35)	78	65
Tinggi (>35)	20	16.7
Jumlah	120	100.0
Rata-rata	1.98	

Berdasarkan tabel 2 diatas mayoritas partisipasi masyarakat berada pada kategori sedang yaitu sebesar 65 persen, kategori tinggi sebesar 16,7 persen dan 18,3 persen terkategori rendah. Secara keseluruhan, rata-rata pengaruh media sosial adalah 1.98 pada skala 1 sampai 5.

Tabel 3. Sebaran responden berdasarkan Kompetensi Aparat (X2)

Kategori (Skala 1-5)	Frequency	Percent
Rendah (<23)	14	14.7
Sedang (23-29)	44	46.3
Tinggi (>29)	27	38.9
Jumlah	95	100.0
Rata-rata	2.24	

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan mayoritas kompetensi aparat berada pada kategori sedang yaitu sebesar 46.3 persen, kategori tinggi 38,9 persen dan 14,7 persen terkategori rendah. Secara keseluruhan, rata-rata kompetensi aparat adalah 2,24 pada skala 1 sampai 5.

Tabel 4. Sebaran responden berdasarkan Siskeudes (X3)

Kategori (Skala 1-5)	Frequency	Percent
Rendah (<26)	4	4.2
Sedang (26-31)	34	35.8
Tinggi (>35)	57	60
Jumlah	95	100.0
Rata-rata	2.56	

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan mayoritas Siskeudes berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 60 persen, kategori sedang 35,8 persen dan 4,2 persen terkategori rendah. Secara keseluruhan, rata-rata Siskeudes adalah 2,56 pada skala 1 sampai 5.

Tabel 5. Sebaran responden berdasarkan Pengawasan (X4)

Kategori (Skala 1-5)	Frequency	Percent
Rendah (<18)	3	3.2
Sedang (18-22)	22	23.2
Tinggi (>22)	70	73.7
Jumlah	95	100.0
Rata-rata		2.71

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan mayoritas pengawasan berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 73.7 persen, kategori sedang 23,2 persen dan 3,2 persen terkategori rendah. Secara keseluruhan, rata-rata pengawasan adalah 2,71 pada skala 1 sampai 5.

2. Analisis Inferensial

Analisis inferensial pada penelitian ini menggunakan analisis *Structural Equation Modeling Based Variance* (VB-SEM) dengan bantuan software Smart-PLS 3.3.

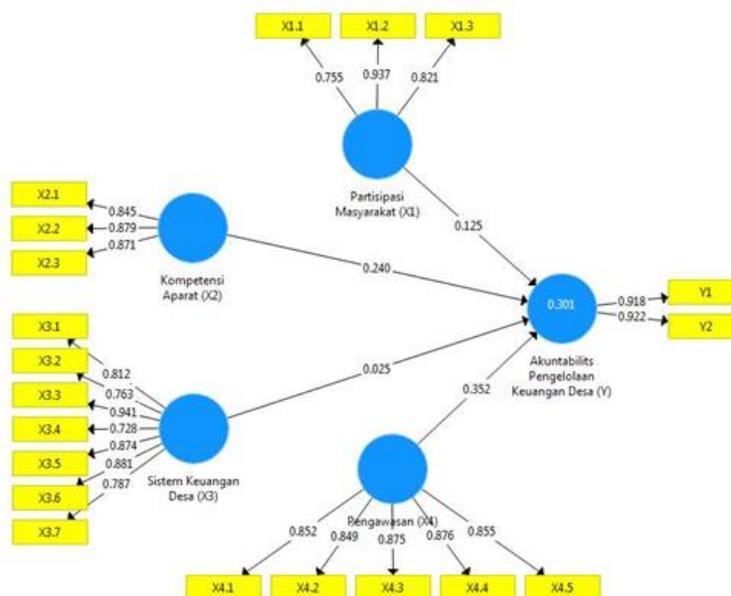
a. Hasil Uji Outer Model

Evaluasi model merupakan model pengukuran yang bertujuan untuk menilai validitas (absah) dan reliabilitas (handal) suatu model. [26]

Pengujian outer model terdiri atas:

- 1) Uji validitas Model
 - a) Outer model

Outer Model Atau Pengukuran Bagian Luar disebut juga sebagai model pengukuran. Uji *outer model* bertujuan untuk menspesifikasikan hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya. Uji *outer model* ini menggunakan bantuan prosedur *PLS Algorithm*. [27].



Gambar 1. Outer Model SEM (Output Smart-PLS)

b) Convergent Validity (Loading Factor)

Uji Validitas Convergent validity bertujuan menentukan nilai loading faktor pada indikator-indikator variabel.

Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil analisis outer model diperoleh nilai outer loading pada masing-masing indikator variabel telah memenuhi nilai validitas dengan nilai >0,7. Oleh karena itu, model di atas dinyatakan valid.

Tabel 6. *Outer Loading (Convergent Validity)*

INDIKATOR	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Partisipasi Masyarakat (X1)	Kompetensi Aparat (X2)	Sistem Keuangan Desa (X3)	Pengawasan (X4)
Pengungkapan seluruh aktifitas pengelolaan keuangan (Y.1)	0,918				
Penyajian laporan keuangan (Y.2)	0,922				
Terlibat dalam perencanaan (X1.1)		0,755			
Terlibat dalam pelaksanaan (X1.2)		0,937			
Terlibat dalam evaluasi (X1.3)		0,821			
Pengetahuan (<i>Knowledge</i>) (X2.1)			0,845		
Kemampuan (<i>Ability</i>) (X2.2)			0,879		
Keterampilan (<i>Skill</i>) (X2.3)			0,871		
Sesuai dengan regulasi (X3.1)				0,812	
Membantu pengelolaan keuangan desa (X3.2)				0,763	
Kemudahan dalam penggunaan aplikasi (X3.3)				0,941	
Didukung dengan petunjuk penggunaan aplikasi (<i>manual book</i>) (X3.4)				0,728	
<i>Built – in Internal control</i> (X3.5)				0,874	
Kesinambungan Maintenance (X3.6)				0,881	
Integrasi Aplikasi (X3.7)				0,787	
Reviu (X4.1)					0,852
Monitoring (X4.2)					0,849
Evaluasi (X4.3)					0,875
Pemeriksaan (X4.4)					0,876
Pemeriksaan lainnya (X4.5)					0,855

Untuk mengukur validitas nilai variabel laten, yang menjadi ukuran adalah *Average Variance Extracted (AVE)* dengan nilai diharapkan >0,5.

Tabel 7. Nilai *Average Variance Extracted (AVE)*

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0,847
Partisipasi Masyarakat (X1)	0,707
Kompetensi Aparat (X2)	0,749
Sistem Keuangan Desa (X3)	0,688
Pengawasan (X4)	0,742

Pada tabel 7 di atas menunjukkan nilai AVE dari setiap variabel dalam penelitian adalah >0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam model SEM yang dianalisis dinyatakan valid.

2) Reliabilitas Model

Untuk menentukan tingkat reliabilitas model SEM nilai yang digunakan adalah *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Reliabilitas jenis ini berfungsi untuk mengetahui tingkat reliabilitas internal dari indikator variabel.

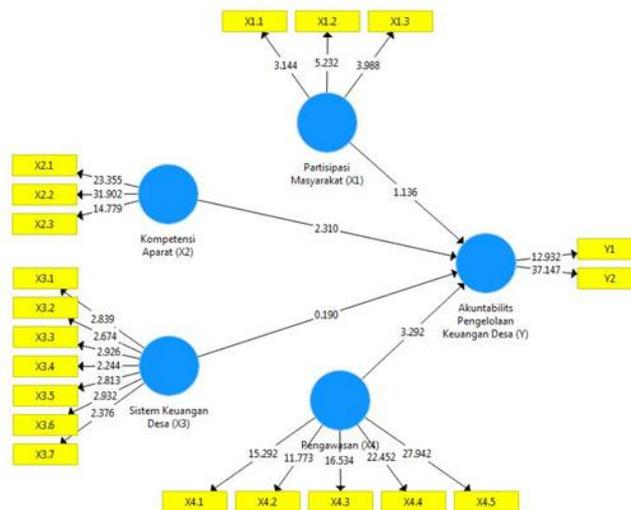
Tabel 8. Nilai *Cronbach Alpha's* dan *Composite Reliability* variabel

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Partisipasi Masyarakat (X1)	0.799	0.878
Kompetensi Aparat (X2)	0.832	0.899
Siskeudes (X3)	0.945	0.939
Pengawasan (X4)	0.914	0.935
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0.819	0.917

Standar nilai *Cronbach's Alpha* suatu variabel dinyatakan reliabel adalah >0,6, sedangkan standar nilai untuk *Composite Reliability* adalah >0,7. berdasarkan nilai tabel 8 di atas diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* >0,06 dan nilai *Composite Reliability* >0,7 sehingga dapat dinyatakan bahwa model SEM yang dianalisis telah reliabel.

b. Hasil Uji Inner Model

1) Inner Model



Gambar 2. Inner Model SEM

Uji *Inner Model* dilakukan untuk menguji hubungan antara konstruk eksogen dan endogen yang telah dihipotesiskan sebelumnya. untuk menghasilkan nilai-nilai pengujian inner model, langkah di SmartPLS dilakukan dengan metode bootstrapping. Uji Inner Model disebut juga dengan uji struktural. [26].

2) Analisis t Statistik

Analisis t Statistik bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh antar variable. Nilai t Hitung yang lebih besar dari pada nilai t Tabel menunjukkan pengaruh variabel yang signifikan. Analisis inner model SEM digunakan untuk melihat besaran nilai t Hitung dan P Value yang juga menjadi ukuran kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 9. Nilai t Variable independen terhadap Variabel dependen

Variabel	T Statistic	T Tabel	P Values	Cut off P Value
Partisipasi Masyarakat -> Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	1,269	1.986	0,205	0.05
Kompetensi Aparat -> Akuntabilitas	2,314	1.986	0,021	0.05

Pengelolaan Keuangan Desa				
Sistem Keuangan Desa -> Akuntabilitas	0,190	1.986	0,849	0.05
Pengelolaan Keuangan Desa				
Pengawasan -> Akuntabilitas	3,203	1.986	0,001	0.05
Pengelolaan Keuangan Desa				

Berdasarkan hasil analisis t Statistik sebagaimana ditampilkan pada Tabel 9 di atas, maka uji hipotesis terhadap variabel endogen dapat dinyatakan sebagai berikut:

Hipotesis 1: Diduga (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap (Y). Hasil analisis t Statistik diperoleh nilai t Hitung = 1.269 < t Tabel = 1.986 dengan nilai P Value sebesar 0,205 atau lebih besar dari pada *Cut off Value* sebesar 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel (X1) berpengaruh signifikan terhadap (Y). Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis 1 ditolak.

Hipotesis 2: Diduga (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap (Y). Hasil analisis t Statistik diperoleh nilai t Hitung = 2,314 > t Tabel: 1.986 dengan nilai P Value sebesar 0,021 atau lebih kecil dari pada *Cut off Value* sebesar 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap (Y). Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis 2 diterima.

Hipotesis 3: Diduga (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap (Y). Hasil analisis t Statistik diperoleh nilai t Hitung = 0,190 < t Tabel: 1.986 dengan nilai P Value sebesar 0,849 atau lebih besar dari pada *Cut off Value* sebesar 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel (X3) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap (Y). Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis 3 ditolak.

Hipotesis 4: Diduga (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap (Y). Hasil analisis t Statistik diperoleh nilai t Hitung = 3,203 > t Tabel: 1,972 dengan nilai P Value sebesar 0,001 atau lebih kecil dari pada *Cut off Value* sebesar 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap (Y). Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis 4 diterima.

3) Hasil Analisis Determinan (R Square)

Tujuan Analisis determinan adalah untuk melihat besarnya pengaruh variabel independent secara bersama memengaruhi variabel dependen. Hasil analisis determinan pada Model SEM disajikan pada tabel berikut:

Tabel 10. Hasil analisis determinan terhadap variabe independen

Pengaruh Variabel	R Square	R Square Adjusted
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0,301	0,270

Berdasarkan tabel 10 diatas dapat diketahui bahwa variabel Partisipasi Masyarakat (X1), Kompetensi Aparat (X2), Sistem Keuangan Desa (X3), dan Pengawasan mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) sebesar 30,1 persen sedangkan 69,9 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

4.2. Pembahasan

1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil analisis tanggapan responden menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan rendah terhadap partisipasi masyarakat pada Desa di Kabupaten Luwu Timur berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan nilai signifikansinya sebesar 0,205 lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$. Hal tersebut berarti bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Namun demikian hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang disampaikan oleh (Rifa'i, Jubertus, and Susanti 2021) [12], (Mutia Basri, Desti Marianti, and Rofika 2020) [11], (Umaira and Adnan 2019) [15], (Indriani, Fahlevi, and Putri 2019) [28] dan (Nurhayati, Purnama, and Mustika 2021) [4] yang menyatakan bahwa semakin baik dukungan dari partisipasi masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas pengeloaan alokasi dana desa.

Hasil analisis SEM juga memperlihatkan bahwa yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap partisipasi masyarakat adalah terlibat dalam pelaksanaan yakni sebesar 93,7 persen. Sementara indikator yang memberikan kontribusi terendah diantara indikator variabel partisipasi masyarakat adalah terlibat dalam perencanaan yakni sebesar 75,5 persen.

2. Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil analisis tanggapan responden menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan tinggi terhadap kompetensi aparat Desa pada Desa di Kabupaten Luwu Timur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan nilai signifikansinya sebesar 0,021 lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$. Hal tersebut berarti bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang disampaikan oleh (Afifi and Nugroho 2021) [29], (Izzah, Taufeni Taufik, and Vera Oktari 2021) [9], (Aprilya and Fitria 2020) [30], (Atiningsih and Ningtyas 2019) [31] dan (Pahlawan, Wijayanti, and Suhendro 2020) [5] menunjukkan bahwa Kompetensi Aparat Desa akan meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa khususnya kemampuan aparat dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyajikan laporan kegiatan, yang berarti semakin baik kompetensi aparat semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hasil analisis SEM juga menjelaskan indikator yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap kompetensi aparat desa adalah kemampuan (*ability*) yaitu sebesar 87,9 persen. Sementara indikator yang memberikan kontribusi terendah diantara indikator variabel kompetensi aparat Desa adalah pengetahuan (*knowledge*) sebesar 84,5 persen.

3. Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil analisis tanggapan responden menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan rendah terhadap sistem keuangan desa pada Desa di Kabupaten Luwu Timur berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan nilai signifikansinya sebesar 0,849 lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$. Hal tersebut berarti bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang disampaikan oleh (Finambello T.M, Hardianto, and Rifa 2021) [19], (Hariwibowo and Setiawan 2020) [32], (Harafonna and Indriani 2019) [18], (Arfiansyah 2020) [6] dan (Sari and Andra Asmara 2021) [33] ini menandakan bahwa pemahaman aparat desa terhadap Siskeudes belum sepenuhnya baik.

Hasil analisis SEM juga memperlihatkan bahwa yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap sistem keuangan desa adalah kemudahan dalam penggunaan aplikasi yakni sebesar 94,1 persen. Sementara indikator yang memberikan kontribusi terendah diantara indikator variabel sistem keuangan desa adalah didukung dengan petunjuk penggunaan aplikasi (*manual book*) yakni sebesar 72,8 persen.

4. Pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil analisis tanggapan responden menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan tinggi terhadap pengawasan pada Desa di Kabupaten Luwu Timur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan nilai signifikansinya sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$. Hal tersebut berarti bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang disampaikan oleh (Purba and Silalah 2021) [34], (Luh Putu Pratiwi Sintya Ningsih 2021) [35], (Sapartiningsih, Suharno, and Kristianto 2018) [36], (Mahmud 2018) [7] dan (Padnyawati and Hutnaleontina 2022) [37] yang menyatakan bahwa apabila penerapan pengawasan berjalan dengan baik maka akuntabilitas keuangan desa juga akan semakin baik.

Hasil analisis SEM juga memperlihatkan bahwa yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap pengawasan adalah pemeriksaan yakni sebesar 87,6 persen. Sementara indikator yang memberikan kontribusi terendah diantara indikator variabel pengawasan adalah monitoring yakni sebesar 84,9 persen.

5. PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka simpulan penelitian ini adalah:

1. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. Kompetensi aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
3. Sistem keuangan desa berpengaruh positif dan namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
4. Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka disarankan :

1. Partisipasi masyarakat (indikator: terlibat dalam perencanaan, terlibat dalam pelaksanaan, terlibat dalam evaluasi) perlu terus dimaksimalkan agar terjadi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (indikator: pengungkapan seluruh aktifitas pengelolaan keuangan, penyajian laporan keuangan) di Kabupaten Luwu Timur.
2. Kompetensi aparat desa (indikator: pengetahuan, kemampuan, keterampilan) perlu terus dipertahankan agar terjadi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Timur.
3. Sistem keuangan desa (indikator: sesuai dengan regulasi, membantu pengelolaan keuangan desa, kemudahan dalam penggunaan aplikasi, didukung dengan petunjuk penggunaan aplikasi (*manual book*), *built – in internal control*, kesinambungan *maintenance*, *integrasi aplikasi*,) perlu terus dimaksimalkan agar terjadi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Timur.
4. Pengawasan (indikator: revidu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, bimbingan dan konsultasi) perlu terus dipertahankan agar terjadi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sekretariat Kabinet RI, “Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022,” 2022. .
- [2] T. Perbub Luwu Timur No. 14, *Peraturan Bupati Luwu Timur No. 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, vol. 3. Kabupaten Luwu Timur, 2019.
- [3] U. Siswadi, Nurhaini, and E. Jayanti, “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dan Kelembagaan Desa Terhadap Pelayanan Masyarakat Desa Cidada Kecamatan Curugbitung,” *J. Stud. Akunt. dan Bisnis*, vol. 9, no. 1, 2021.
- [4] N. Nurhayati, D. Purnama, and M. Mustika, “Faktor-Faktor Pendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa,” *JIAFE (Jurnal Ilm. Akunt. Fak. Ekon.*, vol. 7, no. 2, 2021, doi: 10.34204/jiafe.v7i2.4072.
- [5] E. W. Pahlawan, A. Wijayanti, and S. Suhendro, “Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa,” *Indones. Account. J.*, vol. 2, no. 2, p. 162, 2020, doi: 10.32400/iaj.29261.
- [6] M. A. Arfiansyah, “Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *J. Islam. Financ. Account.*, vol. 1, no. 2, 2020.
- [7] U. Mahmud, “Pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor,” *J. Ilm. Sint. Ilmu Adm.*, vol. 3, no. 5, 2018.
- [8] I. R. Rivan, Arif and Maksum, “Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” *J. Adm. Publik (Public Adm. Journal)*, 2019.
- [9] D. Izzah, T. Taufik, and V. Oktari, “Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa-Desa Di Kabupaten Kampar,” *Curr. J. Kaji. Akunt. dan Bisnis Terkini*, vol. 2, no. 1, 2021, doi: 10.31258/jc.2.1.12-28.
- [10] E. Marlina, S. Rahmayanti, and A. D. R. A. Putri, “Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim, Riau,” *J. Akunt. dan Ekon.*, vol. 11, no. 1, 2021, doi: 10.37859/jae.v11i1.2517.
- [11] Y. M. Basri, T. D. Marianti, and R. Rofika, “Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya,” *JAK (Jurnal Akuntansi) Kaji. Ilm. Akunt.*, vol. 8, no. 1, 2020, doi: 10.30656/jak.v8i1.2379.
- [12] M. Rifa’i, J. Jubertus, and R. A. D. Susanti, “Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pajak, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa,” *J. Sains Sosio Hum.*, vol. 5, no. 2, 2021, doi: 10.22437/jssh.v5i2.16044.
- [13] N. E. Indraswari and Y. Rahayu, “Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa , Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 10, no. 4, pp. 1–15, 2021.
- [14] M. Siregar, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat),” *J. Ilm. Kohesi*, vol. 4, no. 2, pp. 3–15, 2020.
- [15] S. Umaira and A. Adnan, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan

- Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya),” *J. Ilm. Mhs. Ekon. Akunt.*, vol. 4, no. 3, 2019, doi: 10.24815/jimeka.v4i3.12580.
- [16] S. Noholo, “Pengaruh Kompetensi SDM, Prinsip Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Suwawa Selatan,” *Jambura Account. Rev.*, vol. 2, no. 1, 2021, doi: 10.37905/jar.v2i1.28.
- [17] Mattoasi, A. Sapeni, and D. P. Musue, “Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Tingkat Pendidikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparat Desa Se-Kecamatan Walea Besar Kabupaten Tojo Una-Una),” *JSAP J. Syariah Account. Public*, vol. 3, no. 2, p. 59, 2021, doi: 10.31314/jsap.3.2.59-65.2020.
- [18] C. N. Harafonna and M. Indriani, “Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening,” *J. Ilm. Mhs. Ekon. Akunt.*, vol. 4, no. 2, 2019, doi: 10.24815/jimeka.v4i2.12277.
- [19] F. Finambello, W. T. Hardianto, and M. Rifa, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penerapan Aplikasi SISKEUDES Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Kapuas,” *J. Public Adm. Sociol. Dev.*, vol. 2, no. 1, 2021.
- [20] E. Trisnadewi, B. Amlayasa, and I. W. Rupa, “Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja siskeudes dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dana desa,” *J. Akunt. FEB Univ. Bengkulu*, vol. 10, no. 1, pp. 37–52, 2020.
- [21] V. Susanti, S. Rizal, I. Indrayenti, K. Khairudin, and H. Haninun, “Pengaruh Pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa Atas Dana Desa Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah,” *J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 11, no. 2, p. 70, 2020, doi: 10.36448/jak.v11i2.1525.
- [22] Permendagri 73, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa,” *Permendagri 73 Tahun 2020*, 2020.
- [23] Sapar, *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif*. Palopo: Unhas Press, 2021.
- [24] A. A. H. Slamet Riyanto, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. CV. BUDI UTAMA, 2020.
- [25] R. S. Hamid and S. M. Anwar, *Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian*, vol. 1. Jakarta Pusat: PT Inkubator Penulis Indonesia, 2019.
- [26] S. Setiaman, “Analisa parsial model persamaan struktural dengan software SMART-PLS Versi 3,” *Tutorial*, pp. 1–95, 2020.
- [27] Meiryani, “Memahami Uji Outer Model (Pengukuran Bagian Luar) Dalam Smart PLS,” *Binus University / Accounting*, 2021. .
- [28] M. Indriani, H. Fahlevi, and S. Putri, “Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar,” *J. Ris. Akunt. dan Keuang.*, vol. 7, no. 1, 2019, doi: 10.17509/jrak.v7i1.14827.
- [29] Z. Afifi and D. H. Nugroho, “Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” pp. 111–117, 2021.
- [30] K. R. Aprilia and A. Fitria, “Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 9, no. 3, pp. 1–20, 2020.
- [31] S. Atiningsih and A. C. Ningtyas, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali),” *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, vol. 10, no. 1. pp. 2015–2019, 2019.
- [32] I. N. Hariwibowo and W. Y. Setiawan, “Evaluating the Implementation of the Rural Financial System (SISKEUDES) in Wonogiri Regency, Indonesia: Success or Failure?,” *Rev. Integr. Bus. Econ. Res.*, 2020.
- [33] N. Sari and J. A. Asmara, “Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Aceh Tengah),” *J. Ilm. Mhs. Ekon. Akunt.*, vol. 6, no. 2, p. 1, 2021.
- [34] S. Purba and M. Silalah, “Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa di Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara,” *J. Mutiara Akunt.*, vol. 6, no. 1, 2021, doi: 10.51544/jma.v6i1.1494.

- [35] L. P. P. S. Ningsih, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Audit Kinerja Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan),” *e-ISSN 2798-8961 Hita Akunt. dan Keuang. Univ. Hindu Indones. Ed. Juli 2021*, pp. 386–405, 2021.
- [36] D. Sapartiningsih, Suharno, and D. Kristianto, “Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *J. Akunt. dan Sist. Teknol. Inf.*, vol. 14, no. 1 Maret, pp. 100–114, 2018.
- [37] N. N. P. Krisnanti, K. D. Padnyawati, and P. N. Hutnaleontina, “Pengaruh Kepemimpinan, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem,” *Hita Akunt. dan Keuang. Univ. Hindu Indones. Ed. Januari 2022*, 2022.